

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, (2007), *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia.
- Adjie, Habib, (2009), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ashshofa, Burhan. (2001), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Djajasudarma, Fatimah, (2006), *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Harsono, Boedi, (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan,
- Kansil CST, (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kartini, J, S, (2001), *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Hadjon, Philipus, (2001), *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rifai, Ahmad, (2010), *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Suekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, (2003), *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SoerjonoSoekanto, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Sudarsono, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Tutik, T, T, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan MA Nomor 65 PK/TUN/2023.

## **JURNAL**

Istanti, Akhmad Khisni, (2017). *Akibat Hukum dari Akta Jual Beli Tanah*

*Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT.*